



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
WEB SEMINAR BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DPR RI
“MELAWAN ANEKSASI ISRAEL ATAS WILAYAH PALESTINA”**

Tahun sidang	: 2019 – 2020
Masa persidangan	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Konsultasi
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Jumat, 10 Juli 2020
Pukul	: 13.30 – 15.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Biro KSAP, Lt. 2, Gedung Nusantara III, DPR RI
Acara	: Web Seminar Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI “Melawan Aneksasi Israel atas Wilayah Palestina”
Ketua Rapat	: Dr. Fadli Zon
Moderator	: Mardani Ali Sera, Wakil Ketua BKSAP DPR RI
Hadir	:

A. NARASUMBER

1. Dr. Fadli Zon, Ketua BKSAP DPR RI
2. Mardani Ali Sera, Wakil Ketua BKSAP DPR RI
3. Febrian A. Ruddyard, Dirjen Kerja Sama Multilateral, Kemenlu RI
4. Yon Machmudi, Pakar Timur Tengah UI
5. Dzikrullah, Civil Society, Sahabat Al-Aqsha

B. ANGGOTA DPR RI

1. Pimpinan

- a. Dr. Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra)
- b. Mardani Ali Sera (Fraksi PKS)

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

- a. Johan Budi S. Pribowo

3. Partai Golongan Karya

- a. Dyah Roro Esti M.Sc.

4. Partai Gerakan Indonesia Raya

- a. Himmatul Aliyah, M.Si.

5. Partai Nasional Demokrat

- a. Muhammad Farhan

6. Partai Kebangkitan Bangsa

- a. Luluk Nur Hamidah

7. Partai Demokrat

- a. Lasmi Indaryani, SE.

8. **Partai Keadilan Sejahtera**
 - a. Surahman Hidayat
9. **Partai Amanat Nasional**
 - a. Ir. Andi Yuliani Paris
10. **Partai Persatuan Pembangunan**
 - a. Emma Umriyyatul Chusnah

C. BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

1. Endah T.D. Retnoastuti
2. Chairil Patria, S.I.P., M.Si.
3. Haryanti, S.A.B., M.A.P.
4. Miranti Widiani, S.Sos., M.Si.
5. Iis Anisa, S.E.
6. Renaldi Setiawan, S.I.P.
7. Hery Prasetyo
8. Miftahudin
9. Yudi Prawira

D. TENAGA AHLI BKSAP

10. Dewi Amelia Tresna Wijanti

I. PEMBUKAAN

1. Virtual Webinar dibuka oleh Ketua BKSAP DPR RI , Dr. Fadli Zon pada pukul 13.30 WIB.
2. Virtual Webinar dipimpin oleh Mardani Ali Sera (Wakil Ketua BKSAP/F-PKS) sebagai moderator.

II. PRESENTASI PANELIS

1. Mardani Ali Sera, Wakil Ketua BKSAP/F-PKS menyampaikan bahwa BKSAP DPR RI telah memprakarsai dukungan anggota parlemen dari seluruh dunia untuk menyetujui Pernyataan Bersama (*Joint Statement*) yang menolak aneksasi Israel atas wilayah Palestina.
2. Febrian A. Ruddyard, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral menyampaikan sebagai berikut:
 - a. Palestina sedang menghadapi aneksasi atas wilayahnya, walaupun strategi tersebut sedang ditunda. Aneksasi ini adalah tindak lanjut dari “*Deal of Century*” yang diajukan oleh oleh Pemerintah AS.
 - b. 6 isu utama yang dipersengketakan adalah, permasalahan perbatasan, pemukiman ilegal, hak kembali bagi pengungsi Palestina, sengketa kota Yerusalem, keamanan, dan akses terhadap air bersih.

- c. Perbatasan dan pemukiman ilegal merupakan akar konflik Israel dan Palestina. Terdapat perubahan signifikan atas perbatasan wilayah yang diakibatkan oleh perang dari tahun 1948 sampai 1967. Hal ini diperparah oleh *creeping annexation*, yang mana salah satu bentuknya adalah pembangunan pemukiman ilegal di Tepi Barat.
- d. Mengacu pada *Deal of Century*, Israel akan menganeksasi seluruh pemukiman komunitas Yahudi di Tepi Barat, yang bernama Yudea dan Samaria menurut pemerintah Israel.
- e. Masalah lain adalah para pengungsi Palestina yang berjumlah 5.5 juta jiwa dan tersebar di seluruh dunia. Ini termasuk 2.2 juta jiwa yang berada di Yordania, dan 1.5 juta di pengungsian. Kondisi mereka memprihatinkan, dan membebani *host countries*.
- f. Amerika Serikat menghentikan kontribusi terhadap UNRWA. Indonesia dan beberapa negara lainnya telah melakukan upaya untuk menutupi *gap* ini.
- g. Dalam hal pengungsi, ada isu *right to return*. Hal ini diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 194, akan tetapi implementasinya masih dalam perdebatan.
- h. Status Yerusalem masih harus dinegosiasikan langsung antara dua pihak. Ketegangan terjadi setelah Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017 dan memindahkan kedutaannya.
- i. Masalah akses terhadap air bersih, dalam konflik Israel dan Palestina, sumber mata air utama dari Israel berasal dari di 2 sumur yang berada di perbatasan Israel dan Palestina.
- j. *Deal of Century* dan isu aneksasi ini dikhawatirkan akan dapat mengerosi satu persatu enam isu ini.

3. Fadli Zon, Ketua BKSAP/F-Gerindra menyampaikan sebagai berikut:

- a. Rencana aneksasi harus dilawan. BKSAP DPR RI telah menginisiasi *Joint Statement/Pernyataan Bersama* yang telah ditandatangani 243 anggota parlemen, termasuk Amerika Serikat.
- b. Diplomasi juga telah dilakukan di berbagai forum parlemen dunia, seperti IPU, APA, AIPA, dan PUIC.
- c. *Deal of the Century* ini merupakan kemunduran dalam persoalan Palestina. Hal ini karena selain tidak melibatkan Palestina, juga mengakui Israel sebagai negara Yahudi, aneksasi semua pemukiman Yahudi di Tepi Barat, mengakui Yerusalem sebagai *undivided capital of Israel*, kendali atas situs

keagamaan di Yerusalem, de-militerasi seluruh wilayah Palestina, pengungsi Palestina tidak dapat kembali ke wilayah yang dianeksasi Israel, dan pembubaran UNRWA.

- d. Hak veto yang dimiliki oleh Amerika Serikat sering menyelamatkan Israel dari sanksi global. Tuntutan reformasi PBB terutama Dewan Keamanan, untuk lebih demokratis dan akomodatif harus menjadi bagian dari perjuangan diplomasi DPR.
 - e. Tekanan diperlukan agar Israel taat kepada aturan Global. Tekanan tersebut dapat berbentuk isolasi politik, ekonomi dan sosial di tingkat regional dan global.
 - f. Rekonsiliasi dari pihak-pihak yang berada di Palestina mutlak dilakukan.
 - g. Isu Palestina bukan hanya permasalahan umat Islam, tetapi merupakan isu kemanusiaan yang serius.
 - h. Peran pemerintah ke depan adalah untuk melakukan intervensi yang lebih aktif dan mengambil inisiatif bukan hanya pada sidang-sidang PBB tetapi juga forum-forum internasional lainnya.
4. Yon Machmudi, Pakar Timur Tengah Universitas Indonesia menyampaikan sebagai berikut:
- a. Resolusi PBB 1967/242 mewajibkan Israel keluar dari wilayah yang diduduki, tetapi sulit diimplementasikan, karena pendudukan tetap berjalan.
 - b. Walaupun dunia internasional tidak mengakui kedudukan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza, secara hukum nasional, parlemen Israel pada tahun 1980 telah mengesahkan Yerusalem Timur sebagai wilayah Israel.
 - c. Aneksasi Tepi Barat merupakan janji Netanyahu dalam pemilu Israel, dan Amerika Serikat memberikan sinyal mendukung.
 - d. PBB menolak karena berdasarkan keputusan ICJ pada tahun 2004, Tepi Barat dan Gaza tidak boleh diubah statusnya.
 - e. Bagi Israel, hal ini merupakan kesempatan yang harus diambil karena akan hilang jika terjadi perubahan politik di AS.
 - f. Palestina hanya menyisakan Gaza yang sewaktu-waktu bisa diintervensi secara militer, politik dan ekonomi. Jika ini terjadi Palestina hanya akan tinggal nama.
 - g. Indonesia perlu ambil peran secara signifikan, tidak bisa hanya reaktif, tetapi perjuangan membantu kemerdekaan dapat dilakukan dengan membentuk

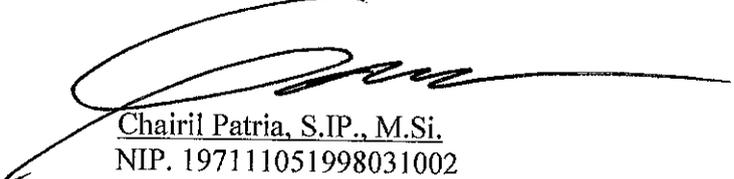
lembaga khusus yang mengawasi perjuangan kemerdekaan Palestina, seperti “*Special Envoy for Palestinians*”

5. Dzikrullah, *Civil Society* “ Sahabat Al-Aqsha” menyampaikan sebagai berikut:
 - a. Masyarakat madani bisa melakukan banyak hal terkait dengan Palestina, kecuali diplomasi politik dan militer karena hal itu yang dapat melakukan hanya negara.
 - b. Pendudukan Israel sudah dimulai, dan dikondisikan oleh Inggris, sejak 1917, pada perang dunia pertama.
 - c. Israel melakukan “*nation cleansing*” dalam 103 tahun terakhir.
 - d. Masyarakat Madani tidak pernah percaya dengan *2 State Solution*.

III. KESIMPULAN

1. *Deal of Century* harus ditolak karena bertentangan dengan resolusi PBB dan kemanusiaan.
2. Dewan HAM telah mengeluarkan *list of companies* yang beroperasi dari wilayah-wilayah aneksasi, dan meminta negara-negara untuk memboikot.
3. Diplomasi yang dilakukan terkait Palestina harus diplomasi total, melibatkan NGO, parlemen, dan perusahaan untuk masuk kepada masing-masing *counterpart*.
4. Tekanan atas aneksasi Israel dirasakan semakin melemah dari tahun-tahun sebelumnya.
5. Parlemen perlu menggalang dukungan dari parlemen seluruh dunia dan kita juga sudah kirim surat ke Presiden IPU.
6. Dalam IPU *meeting* yang akan datang, DPR RI akan mengajukan usulan resolusi terkait perlawanan atas aneksasi Israel.
7. Menyusun *white paper* tentang aneksasi Israel yang bisa dikirimkan kepada seluruh parlemen di dunia.
8. Grup Kerja Sama Bilateral juga bisa dijadikan media komunikasi dan negosiasi.
9. Kementerian Luar Negeri disarankan untuk membentuk Satuan Tugas terutama di negara-negara yang berbatasan secara langsung.

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,



Chairil Patria, S.IP., M.Si.
NIP. 197111051998031002